



KR-Antara/lggoy el Fitra.

PAWAI OBOR: Anak-anak mengikuti pawai obor keliling di *Perumahan Abi Singgalang Kabupaten Padangpariaman Sumatera Barat, Jumat (8/7). Pawai obor pada malam takbiran itu untuk menyambut hari raya Idul Adha 1443 H yang digelar warga setempat yang sebagian merayakannya pada Sabtu (9/7).*

UMY Dampingi UM Gresik dalam Akreditasi

BANTUL (KR) - Revolusi industri 4.0 menuntut institusi pendidikan untuk mengadopsi kurikulum kekinian agar relevan diimplementasikan. Hal tersebut membuat beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) terancam, karena kekurangsiapan mengadopsi kurikulum kekinian. Untuk maju bersama, PTM dengan akreditasi unggul turut berkontribusi mendampingi PTM lain.

"Saat ini banyak PTM yang terancam. Puluhan PTM sudah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) kepada UMY. UMY banyak mendampingi PTM lain dalam akreditasi, baik di tingkat universitas maupun akreditasi program studi," ujar Rektor UMY Prof Dr Gunawan Budiyanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara UMY dengan Universitas Muhammadiyah Gresik, kemarin di kampus UMY Tamantirto.

Gunawan menegaskan, ada tiga poin utama yang harus dan penting diperhatikan para rektor PTM untuk keberlangsungan kampusnya. "Pertama, memperkuat Sumberdaya manusia. Kedua, proses pembelajaran meliputi pengontrolan terhadap proses pembelajaran, jumlah pendaftar, jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, sampai pada data mahasiswa yang bekerja 3 hingga 4 bulan pascamenjadi alumni.

Ini lah yang menjadi nyawa kita. Ketiga, memperhatikan lembaga pembelajaran," tegas Gunawan.

Rektor UM Gresik Dr Eko Budi Leksono mengemukakan, harapan dapat belajar bersama UMY untuk memperbaiki kekurangan terlebih dalam penjaminan mutu. "Semoga melalui kerja sama ini kami dapat *ngangsu kawruh* (menimba ilmu) dengan UMY. Termasuk penjaminan mutu yang perlu diperhatikan, karena masih ada kekurangan dan harus kami kembangkan," ujar Rektor UM Gresik.

Sedangkan, Wakil Rektor Bidang Akademik UMY Prof Dr Sukamta memaparkan, kurikulum yang berkembang saat ini salah satunya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sehingga, perlu ada penyesuaian sistem di dalam universitas. "UMY sendiri mengikuti program MBKM Dikti meski juga memiliki MBKM mandiri. Beberapa hal yang sedang kita kembangkan di antaranya kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) dan sedang dalam penerbitan SK Rektor, menyangkut biaya juga kita susun, serta software. Dengan demikian, melalui software untuk memberi potrait kompetensi mahasiswa yang semakin komprehensif," ungkap Sukamta. **(Fsy)**

DITJEN DISKI SALURKAN INTENSIF

Dorong Peningkatan Kekayaan Intelektual

JAKARTA (KR) - Untuk meningkatkan gairah berinovasi pada riset di perguruan tinggi vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kemendikbudristek melalui Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi memberikan bantuan insentif.

Upaya ini dilakukan untuk mendorong penyelenggara pendidikan vokasi berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan direkognisi secara internasional. Bantuan insentif yang diberikan Ditjen Diksi ini, juga sebagai upaya untuk terus memotivasi dosen vokasi dalam menghasilkan kekayaan intelektual (KI) berupa paten serta penerbitan artikel bereputasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kiki Yuliati mengatakan, pendampingan dosen dalam menyusun draf paten maupun pendaftaran masih diperlukan, termasuk dalam hal penulisan artikel ke dalam jurnal bereputasi. Sebab, belum semua politeknik negeri memiliki sentra KI sebagai unit yang fokus membantu dalam pengusulan paten.

"Diperlukan langkah-langkah strategis, mulai dari meningkatkan jum-

lah pendidikan dan pelatihan vokasi, perbaikan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, penambahan jumlah lulusan vokasi yang memiliki sertifikat tenaga terampil, pendidikan dan pelatihan vokasi yang melibatkan swasta dan korporasi, sehingga lebih mengerti jumlah dan kebutuhan SDM (*link and match*) serta memperbanyak jumlah pembelajaran berbasis industri atau *teaching factory* (tefa) dan memberikan kesempatan bagi praktisi agar dapat mengajar di SMK dan politeknik," terang Dirjen Diksi, Kiki Yuliati pada acara 'Sosialisasi Program Bantuan Insentif Kekayaan Intelektual dan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi Dosen Vokasi TA 2022' di Jakarta, Jumat (8/7).

Dirjen Kiki menegaskan, upaya untuk mendorong industri dalam kawasan industri melaksanakan kerja sama dengan pendidikan vokasi harus

terus digalakkan. Demikian juga peningkatan kerja sama pendidikan vokasi dengan para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) untuk membangun sinergi kekuatan nasional. Mengingat, percepatan revitalisasi pendidikan vokasi sangat diperlukan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ditjen Diksi akan terus meningkatkan sinergi antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia industri maupun UMKM untuk pengembangan sumber daya manusia yang siap kerja, serta membuka seluas-luasnya kesempatan magang bagi peserta didik vokasi. Ia menekankan perlunya keterlibatan pelaku industri dalam pembelajaran termasuk dengan memperbesar bobot SKS yang didapat mahasiswa setelah menjalankan praktik dalam belajar dari praktisi industri.

Dirjen Diksi menyebutkan, sejumlah institusi pendidikan vokasi yang berpeluang mendapat insentif guna mendorong pencapaian produktivitasnya. Intitusi yang dimaksud yaitu 44 politeknik negeri, 5 akademi komunitas negeri, 191 politeknik swasta, 37 akademi komunitas swasta dan prodi-prodi vokasi yang ada di 2.152 universitas, institut dan sekolah tinggi. **(Ati)**

Stikes Mitra Husada Dampingi Migrasi Data PDDikti

KARANGANYAR (KR) - STIKes Mitra Husada Karanganyar menjadi tuan rumah pendampingan migrasi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam kegiatan itu disampaikan perubahan bentuk perguruan tinggi dan numenkatur program studi mutlak diikuti migrasi data pada numenkatur yang sesuai penyelenggaraan program studi.

Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar l



KR-Abdul Ailm

Pendampingan migrasi data PDDikti di STIKes Mitra Husada Karanganyar.

Rohmadi SKom MKom migrasi data diperlukan kepada KR, mengatakan na memenuhi kesinambun-

gan data mahasiswa yang dapat ditelusuri melalui laman PDDIKTI.

"Tujuan kegiatan pendampingan adalah membantu dan memfasilitasi perguruan tinggi yang kesulitan dalam proses migrasi data. Kegiatan ini merupakan rangkaian proses migrasi data yang diawali pra kegiatan migrasi data dengan melakukan verifikasi penyiapan berkas, penilaian kekurangan isian dalam sistem pelaporan dan persyaratan yang lain," katanya. **(Lim)**

EKONOMI

LANXESS Rampungkan Akuisisi Bisnis

JAKARTA (KR) - Perusahaan bahan kimia khusus LANXESS telah merampungkan akuisisi unit bisnis pengendali mikroba dari grup AS International Flavours & Fragrances Inc. (IFF). Dengan penutupan transaksi yang diumumkan pada Agustus 2021 lalu, LANXESS menjadi salah satu pemasok produk pengendali mikroba terbesar di dunia. Perusahaan bahan kimia khusus ini secara signifikan meningkatkan portofolio bahan aktif antimikroba dan formulasi untuk perlindungan bahan, pengawet serta desinfektan, selain memperkuat eksistensi globalnya, terutama di Amerika Serikat. Untuk akuisisi ini, LANXESS membeli di harga awal sekitar USD 1,3 miliar.

"Dengan akuisisi ini, kami menerima dorongan besar untuk segmen Consumer Protection, yang akan segera menjadi segmen terkkuat kami serta menjadi penggerak penting dalam upaya menjadikan LANXESS lebih stabil dan menguntungkan," kata Matthias Zachert, Ketua Dewan Manajemen LANXESS AG di Jakarta, Minggu (10/7).

LANXESS juga menambah dua lokasi produksi ke jaringannya di Amerika Serikat, tepatnya di St. Charles, Louisiana dan di Institute, West Virginia. Bisnis baru ini akan diintegrasikan ke dalam unit bisnis Material Protection Products. "Dengan menggabungkan LANXESS serta bisnis yang diakuisisi, kami sekarang membangun platform produk dan teknologi yang tangguh dan luas untuk pengendalian mikroba dan biosida, mulai dari bahan aktif hingga formulasi yang kuat. Hal ini memungkinkan kami menawarkan solusi berorientasi aplikasi tambahan kepada para pelanggan serta memperkuat rantai nilai kami," kata Michael Schaefer, kepala unit bisnis Material Protection Porducts. **(Rsv)**

Tarif PNPB Bea Lelang Sampai 0 Persen

JAKARTA (KR) - Kementerian Keuangan menetapkan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Bea Lelang sampai dengan 0 persen (nol persen). Kebijakan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 95/PMK.06/2022.

Pengenaan tarif Bea Lelang sampai dengan 0 persen ini dimaksudkan guna memberikan dorongan pengembangan lelang sebagai instrumen jual beli, salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dukungan untuk pelaku usahausaha mikro k3vil menengah (UMKM) yang terdampak pandemi. "Kebijakan ini juga disusun untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terkait penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana," kata Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Joko Prihanto dalam media briefieng yang digelar secara daring, Jumat (8/7).

PNBP berupa bea lelang sampai dengan 0 persen ini berlaku untuk penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di lingkungan Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Pejabat Lelang Kelas II, yang meliputi Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli. Pengenaan tarif Bea Lelang dimaksud hanya berlaku untuk Lelang Produk UMKM, Lelang Terjadwal Khusus, dan Lelang Eksekusi Benda Sitaan dalam tindak pidana yang perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht). "Tarif Bea Lelang untuk Lelang Produk UMKM sebesar 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli dan sebesar 1 persen untuk Bea Lelang Penjual," jelasnya.

Dikatakan, pengenaan tarif dimaksud dapat diberikan dengan syarat lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, barang yang dilelang adalah produk UMKM kecuali kendaraan bermotor, Penjual adalah pelaku UMKM yang ditunjukkan dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha (IUMK/SIUP/IUI). Adapun untuk Lelang Terjadwal Khusus yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, Bea Lelang Pembeli sebesar 0 persen dan Bea Lelang Penjual dikenakan sebesar 1 persen. **(Lmg)**

TINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

OJK Larang Iklan Platform Aplikasi Terintegrasi

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang pasar modal melakukan pemasaran, promosi, atau iklan terhadap produk dan layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri (offshore products).

Penegasan ini disampaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mencegah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat terkait dengan produk jasa keuangan yang ditawarkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Jakarta, Sabtu (9/7) menjelaskan, larangan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi (super apps) yang digunakan dalam satu group usaha. "OJK menemukan banyak super apps yang memuat penawaran produk investasi berupa efek (saham, obligasi) yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri (offshore products) yang berada di luar kewenangan pengawas-

an OJK," jelasnya.

Ditegaskan, pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diperkenankan. Mengingat produk ini bukanlah produk yang berizin dari OJK sehingga memiliki risiko yang cukup besar bagi masyarakat. "Produk Investasi yang diawasi oleh OJK antara lain berupa efek (surat berharga) yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan telah dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik. Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri, crypto assets, emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan diawasi oleh OJK," kata Hoesen.

OJK telah melakukan pembi-

naan dan mengambil langkah-langkah tegas khususnya bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam praktik pemasaran, promosi atau iklan produk dan layanannya dengan meminta untuk segera menghentikan layanan dan atau penawaran produk di luar izin dan pengawasan OJK melalui aplikasi terintegrasi (satu atap/super apps) yang mencantumkan logo OJK atau pernyataan bahwa produk dan PUJK tersebut telah berizin dan diawasi oleh OJK. Melakukan pemisahan penggunaan aplikasi, platform, dan situs web terhadap produk dan layanan yang bukan di bawah pengawasan OJK dengan produk dan layanan yang berizin dan di bawah pengawasan OJK.

Sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang memuat ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi,

dan iklan terkait produk dan layanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 POJK Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen, menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan. Menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas, memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen dan menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandikan dengan bahasa asing dalam dokumen mengenai produk dan/atau layanan, dalam hal produk dan/atau layanan akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing. **(Lmg)**

MIMPI DAN INOVASI ANAK BANGSA

Wujudkan Kedaulatan Digital Indonesia



KR-Istimewa

Komisaris Independen Telkom Abdi Negara Nurdin dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah melakukan prosesi potong tumpeng HUT ke-57 Telkom.

digital," ujar Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Minggu (10/7) terkait capaian Telkom di usianya yang ke-57 tahun. 'Digital Bisa untuk Semua' menjadi tema HUT

ke-57 Telkom yang dirayakan 5-6 Juli 2022 dengan tajuk 'Funtastic Days 2022: Learn, Grow and Contribute to Indonesia. Tema ini menggambarkan semangat dan mimpi besar

Telkom untuk mengakselerasi terwujudnya mimpi-mimpi anak bangsa melalui digitalisasi di berbagai bidang. "Telkom mengajak anak bangsa Indonesia untuk berani bermimpi dan lahirkan inovasi, karena semua inovasi terbaik berasal dari sebuah mimpi," kata Ririek.

Ririek mengatakan, lingkungan digital salah satunya bisa diciptakan melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak 2019 hingga 2022 investasi APBN untuk pembangunan infrastruktur digital telah mencapai Rp 75 triliun. **(San)**